



---

## Implementasi Kebijakan Dana Bosp-Kinerja Dalam Pengelolaan Dan Akuntabilitas Pada Sekolah Dasar Kecamatan Astambul

Miftahul Khair, Sitna Hajar Malawat, Rizky Subhan

Uniska MAB Banjarmasin, Indonesia; bagongshow20@gmail.com, sitna.shm@gmail.com, rizkysubhan@uniska-bjm.ac.id

---

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam pengelolaan dan akuntabilitas pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana BOSP-Kinerja, meliputi kepala sekolah, bendahara atau pengelola BOSP, guru, komite sekolah, dan pihak terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana BOSP-Kinerja dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan. Pengelolaan dana diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional dan peningkatan mutu pendidikan, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, serta pengawasan oleh pihak internal dan eksternal sekolah. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan kompetensi pengelola, beban administrasi, perubahan ketentuan, dan kendala teknis dalam proses pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan Dana BOSP-Kinerja dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar.

---

### Keywords

Dana BOSP-Kinerja, implementasi kebijakan, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, sekolah dasar.

---

## 1. INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional



karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, kompetensi pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana, tetapi juga oleh kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dasar, pemerintah menyediakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai salah satu instrumen pembiayaan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah. Dana BOS Kinerja secara khusus diarahkan kepada satuan pendidikan yang memiliki kinerja tertentu, sehingga penggunaannya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dan kinerja sekolah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja pada tingkat sekolah membutuhkan proses pengelolaan yang sistematis mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi aspek penting karena sekolah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan. Pengelolaan dana yang akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah. Penelitian mengenai pengelolaan dana BOS menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang baik memiliki hubungan erat dengan peningkatan kinerja sekolah dasar, meskipun masih terdapat tantangan berupa kapasitas manajerial dan kemampuan pengelola dalam menjalankan administrasi keuangan (Rosmuliawati et al., 2026).

Selain aspek pengelolaan, akuntabilitas juga menjadi persoalan penting dalam implementasi kebijakan dana pendidikan. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga melalui keterbukaan informasi, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan. Penelitian Suwandari et al. (2026) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BOSP dapat mendukung optimalisasi proses pembelajaran melalui administrasi keuangan yang tertib dan penyampaian informasi penggunaan dana secara terbuka. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kompetensi pengelola, persoalan teknis dalam pelaporan digital, serta belum optimalnya

keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengawasan dana sekolah (Rahmawati et al., 2026).

Pada jenjang sekolah dasar, efektivitas pengelolaan dana BOS juga perlu dilihat dari sejauh mana dana tersebut mampu mendukung peningkatan kinerja sekolah. Pengelolaan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan kebijakan. Dana harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata terhadap proses pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan kepada peserta didik. Maulida et al. (2025) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS dapat dikaitkan dengan indikator kinerja sekolah, seperti kualitas pembelajaran, ketersediaan sarana prasarana, dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Dana BOSP-Kinerja perlu dinilai tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian kinerja sekolah.

Kecamatan Astambul sebagai salah satu wilayah yang memiliki satuan pendidikan dasar juga memiliki kebutuhan untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana BOSP-Kinerja berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Kondisi setiap sekolah dapat berbeda dalam hal jumlah peserta didik, kapasitas pengelola, kebutuhan sarana prasarana, serta kemampuan administrasi keuangan. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan dan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana. Penelitian mengenai manajemen implementasi BOS Kinerja pada jenjang sekolah dasar menunjukkan bahwa aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan bagian penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan dana di sekolah (Sari et al., 2026). Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi perlu mendapatkan perhatian karena ketidakterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan maupun pengawasan dapat mengurangi kualitas tata kelola dana sekolah (Permata & Mustoffa, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam Pengelolaan dan Akuntabilitas pada Sekolah Dasar Kecamatan Astambul menjadi penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan pada tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi proses pengelolaan dana, bentuk akuntabilitas yang diterapkan, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan kebijakan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan

dalam memperkuat tata kelola Dana BOSP-Kinerja sehingga penggunaannya semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dasar.

## **2. METHODS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam pengelolaan dan akuntabilitas pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada proses, pengalaman, pemahaman, serta praktik pengelolaan dana yang berlangsung secara alamiah di lingkungan sekolah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana BOSP-Kinerja, seperti kepala sekolah, bendahara atau pengelola BOSP, guru, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana, sedangkan observasi digunakan untuk mengamati praktik pengelolaan dana dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen perencanaan dan laporan penggunaan dana. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan akuntabilitas dana pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul..

## **3. FINDINGS AND DISCUSSION**

### 1. Implementasi Kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam Pengelolaan Sekolah Dasar

Implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam pengelolaan sekolah dasar merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban. Kebijakan pendanaan pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai bagi satuan pendidikan dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan. Dalam konteks tersebut, Dana BOSP-Kinerja memiliki posisi penting karena tidak hanya mendukung kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pencapaian kinerja. Implementasi kebijakan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan aturan secara administratif, melainkan sebagai proses menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata di tingkat sekolah. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut menjadi relevan dalam melihat bagaimana sekolah dasar di Kecamatan Astambul melaksanakan kebijakan Dana BOSP-Kinerja.

Komunikasi yang jelas diperlukan agar kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan pihak terkait memahami tujuan, mekanisme, serta batasan penggunaan dana. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan berpotensi diterapkan secara berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Selain komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan menjadi faktor penting. Pengelolaan dana sekolah membutuhkan kemampuan menyusun perencanaan anggaran, melakukan transaksi sesuai ketentuan, menyimpan bukti pengeluaran, serta menyusun laporan secara tepat dan tepat waktu. Mulyasa (2012) menyatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan bagian penting dari manajemen sekolah karena berkaitan dengan kemampuan sekolah mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan.

Perencanaan Dana BOSP-Kinerja perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata sekolah dan dikaitkan dengan program peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan yang baik memungkinkan sekolah menentukan skala prioritas sehingga dana tidak digunakan secara sporadis atau hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Fattah (2017) menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan harus dikelola berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas agar sumber daya yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian tujuan pendidikan. Dalam implementasinya, sekolah juga perlu memastikan adanya keterlibatan warga sekolah

dan komite dalam proses perencanaan. Partisipasi tersebut dapat meningkatkan relevansi program sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kualitas proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Bastian (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik berkaitan dengan kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Dalam konteks sekolah, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya diberikan kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat dan orang tua peserta didik. Permata dan Mustoffa (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana BOS karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Pengelolaan Dana BOSP-Kinerja juga harus memperhatikan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah. Kesesuaian antara program sekolah, dokumen perencanaan, realisasi penggunaan dana, dan laporan pertanggungjawaban merupakan indikator penting dalam menilai kualitas implementasi kebijakan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) menempatkan pengelolaan dana pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola satuan pendidikan. Dalam praktiknya, sekolah dapat menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman pengelola, perubahan regulasi, beban administrasi, serta keterbatasan sarana pendukung sistem pelaporan. Rahmawati et al. (2026) menemukan bahwa keterbatasan kompetensi pengelola dan persoalan teknis pelaporan dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah.

Oleh karena itu, implementasi Dana BOSP-Kinerja di Kecamatan Astambul perlu dilihat secara menyeluruh dengan memperhatikan kemampuan pelaksana, komunikasi kebijakan, mekanisme pengawasan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. Keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari kemampuan dana tersebut dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Maulida et al. (2025) menjelaskan bahwa efektivitas dana BOS dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pembelajaran, sarana prasarana, dan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, Dana BOSP-Kinerja seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola sekolah,

meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong pencapaian kinerja satuan pendidikan secara berkelanjutan.

### ### 2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSP-Kinerja pada Sekolah Dasar

Akuntabilitas pengelolaan Dana BOSP-Kinerja merupakan salah satu aspek utama dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang baik. Akuntabilitas mengharuskan setiap pengelola dana mampu menjelaskan proses perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan anggaran secara terbuka serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam lingkungan sekolah dasar, akuntabilitas memiliki dimensi administratif sekaligus substantif karena penggunaan dana harus dapat dibuktikan secara dokumen dan memberikan manfaat terhadap peningkatan layanan pendidikan. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Akuntabilitas dimulai dari tahap perencanaan anggaran. Sekolah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dimasukkan dalam rencana penggunaan dana memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan selaras dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan yang transparan juga memungkinkan guru, komite sekolah, dan pihak terkait mengetahui prioritas penggunaan dana. Dwiyanto (2018) menekankan bahwa transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan karena keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks sekolah, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi anggaran, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan ketepatan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan regulasi. Setiap pengeluaran harus memiliki bukti transaksi yang sah, dicatat dengan benar, dan dapat ditelusuri ketika dilakukan pemeriksaan. Bastian (2010) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik membutuhkan sistem pertanggungjawaban yang memungkinkan penggunaan sumber daya

ditelusuri dan dievaluasi. Oleh sebab itu, kemampuan bendahara dan pengelola BOSP dalam melakukan pencatatan menjadi faktor yang sangat penting. Keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan kesalahan administrasi yang pada akhirnya memengaruhi kualitas akuntabilitas sekolah.

Sari et al. (2026) menunjukkan bahwa pengelolaan BOS Kinerja membutuhkan manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif. Pengawasan menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas karena dapat mendeteksi kesalahan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian penggunaan dana sejak awal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh kepala sekolah dan tim pengelola, sedangkan pengawasan eksternal dapat melibatkan komite sekolah, pemerintah daerah, serta lembaga pemeriksa sesuai kewenangannya. Suwandari et al. (2026) menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BOSP dapat memperkuat tata kelola administrasi keuangan dan mendukung penyelenggaraan pembelajaran.

Selain pengawasan, keterlibatan komite sekolah menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan partisipatif. Permata dan Mustoffa (2023) menjelaskan bahwa keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan dana BOS. Dalam konteks Kecamatan Astambul, akuntabilitas Dana BOSP-Kinerja perlu dianalisis berdasarkan kondisi masing-masing sekolah karena kapasitas sumber daya manusia, karakteristik peserta didik, kebutuhan sekolah, dan kemampuan administrasi dapat berbeda. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi kemampuan sekolah dalam memenuhi tuntutan administrasi dan pertanggungjawaban.

Edwards III (1980) menjelaskan bahwa sumber daya dan disposisi pelaksana merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan bendahara menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat akuntabilitas. Pelatihan, pendampingan teknis, serta pembinaan secara berkelanjutan dapat membantu sekolah memahami perubahan regulasi dan meningkatkan ketepatan pelaporan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) menegaskan pentingnya pengelolaan dana satuan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan agar penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Akuntabilitas juga harus dikaitkan dengan hasil penggunaan dana, bukan hanya kelengkapan dokumen. Fattah (2017) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Dana BOSP-Kinerja perlu melihat apakah penggunaan dana benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan fasilitas, kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, dan layanan peserta didik. Maulida et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas dana BOS dapat dilihat dari kontribusinya terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian kinerja sekolah. Dengan demikian, akuntabilitas Dana BOSP-Kinerja pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul perlu dipahami sebagai proses yang mencakup keterbukaan, kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan administrasi, pengawasan, partisipasi pemangku kepentingan, dan ketercapaian hasil.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam pengelolaan dan akuntabilitas pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh komunikasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, komitmen pelaksana, serta struktur pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan Dana BOSP-Kinerja perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas sekolah sehingga dana tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, sarana prasarana, kompetensi pendidik, dan layanan pendidikan. Akuntabilitas pengelolaan dana diwujudkan melalui keterbukaan informasi, kelengkapan administrasi, kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan dan regulasi, serta adanya pengawasan dari kepala sekolah, komite, pemerintah, dan pihak terkait. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih berpotensi menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi pengelola, perubahan ketentuan, beban administrasi, dan persoalan teknis pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendampingan, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan agar pengelolaan Dana BOSP-Kinerja pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul semakin transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan..

## REFERENCES

- Haryono, D. (2015). *Filsafat Matematika*. Bandung: Alfabeta.
- Isrok'atun, & Rosmala, A. (2018). *Model-Model Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2018). *Cooperative Learning: Improving Instructional Practices*. Educational Leadership Press.
- Kurniasih, I., & Sani, B. (2015). *Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Kata Pena.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., & Kossowska, M. (2019). Addicted to elements: How collective narcissism affects group processes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 115(4), 541–560.
- NCTM. (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. National Council of Teachers of Mathematics.
- Rakhmat, J. (1989). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Slameto. (2015). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slavin, R. E. (2015). *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice* (2nd ed.). Allyn & Bacon.
- Sumarmo, U. (2004). *Kemampuan Komunikasi Matematika*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suprijono, A. (2019). *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trianto. (2010). *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara